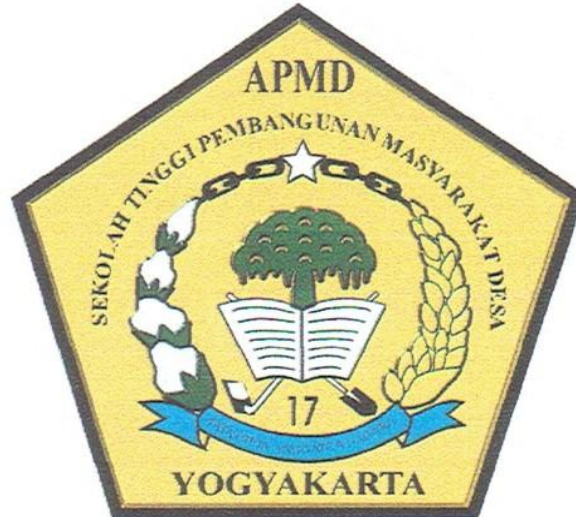


SKRIPSI

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA DEPOK**



Disusun Oleh :

SEPTI TRI ARIDINI

NIM : 11520214

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

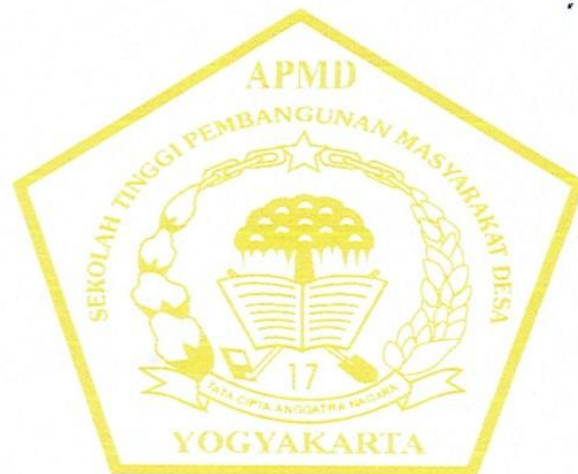
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA



SKRIPSI

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA DEPOK**



Disusun Oleh :

SEPTI TRI ARIDINI

11520214

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Jum’at

Tanggal : 06 April 2018

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Pembimbing



Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si.
Penguji I



Dra. Herawati, MPA.
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sandan, S.IP., MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Tri Aridini

NIM : 11520214

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Pendapat yang pernah ditulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 April 2018

Septi Tri Aridini

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kahadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul” PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DIKOTA DEPOK”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Sarjana Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun dengan bantuan berbagai pihak, khusus nya dosen pembimbing, Alhamdulillah segala hambatan dan kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi.

Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada insan akademis. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan akademis yang ada dengan sebaik-baiknya, namun apabila masih ada kekurangan, peneliti mohon saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Penyelesaian skripsi ini atas dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta beserta Wakil Ketua
2. Bapak Gregorius Sahdan, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing
4. Seluruh Dosen dan staf STPMD “APMD” Yogyakarta

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok
7. Terima kasih kepada teman-teman dan berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga nama-nama yang saya sebutkan tersebut di atas mendapatkan pahala dari Allah SWT yang berlipat ganda. Amin, Amin Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, 06 April 2018

Septi Tri Aridini

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA :

♥ Allah SWT ♥ Alhamdulillah atas Kuasa dan Kehendak-MU

hamba dapat menyelesaikan skripsi ini

♥TerimaKasih Ya Allah♥

&

♥ My Wonder Women ♥ Terima Kasih Mama yang tidak pernah bosan memberikan doa dan support sehingga aku bisa melewati fase-fase dalam hidupku. Aku akan menjadi anak yang lebih baik dan bisa diandalkan dimasa depan.

♥Saranghae Mama♥

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah {2}: 286)

TAKE ACTION !!!

Entah kamu mulai telat dibanding yang lain,

Entah yang lain sudah lebih unggul,

Yang penting kamu mulai bertindak sekarang!

INGAT keunggulan langkah,

tidak harus berarti, keunggulan hasil akhir

(Hingdranata Nikolay)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
1. Pengelolaan.....	12
2. Pendapatan Asli Daerah.....	15
3. Pembangunan Daerah	24
F. Ruang Lingkup	29
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Unit Analisis	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31

H. Teknik Analisis Data	33
BAB II PROFIL KOTA DEPOK	35
A. Gambaran Umum	35
1. Kondisi Geografis	35
2. Kondisi Demografis	36
3. Kondisi Iklim	39
4. Kondisi Musim.....	40
B. Visi Misi Kota Depok	41
1. Visi Kota Depok.....	41
2. Misi Kota Depok.....	42
3. Mata Pencaharian	43
C. Pekerjaan Umum.....	45
D. Keuangan Daerah	46
E. Profil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok	51
1. Visi dan Misi.....	51
2. Tugas Pokok Organisasi.....	53
3. Data Kepegawaian	58
BAB III ANALISIS DATA	62
A. Deskripsi Informan.....	62
B. Analisis Data	63
1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kota Depok	63

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Depok	75
3. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Depok.....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012– 2016.....	7
Tabel I. 2	Tabel Informan.....	
Tabel II. 1.	Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan dan Kelurahan	36
Tabel II. 2.	Jumlah Penduduk di Kota Depok Tahun 2014-2016.....	41
Tabel II. 3.	Jumlah Penduduk Kota Depok menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2016	42
Tabel II. 4.	Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	43
Tabel II. 5.	Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016	44
Tabel II. 6.	Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) Di Kota Depok	45
Tabel II. 7.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 – 2016	46
Tabel II. 8.	Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2016.....	50
Tabel II. 9.	Proporsi Alokasi Anggaran Pekerjaan Umum	51
Tabel II. 10.	Data Kepegawaian Menurut Pendidikan.....	58
Tabel III.1.	Deskripsi Informan menurut Jabatan	62
Tabel III.2.	Realisasi Pendapatan Kota Depok Tahun Anggaran 2014-2016	65
Tabel III.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 – 2016	67
Tabel III.4.	Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2016.....	75

SINOPSIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok diidentifikasi berdasarkan dinamika yang terjadi. Kondisi Kota Depok sekarang sudah sangat parah sehingga perlu terobosan pembangunan infrastruktur jalan, baik pembangunan jalan baru maupun pelebaran sangat dibutuhkan bagi Kota Depok yang terus berkembang sebagai salah satu mengurai kemacetan serta kemerawutan lalulintas yang terjadi setiap hari. Kota Depok diusianya yang menginjak 19 tahun masih harus berbenah, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok yang masih belum maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan. Sementara itu yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok. Subyek dalam penelitian ini sekaligus informan sebanyak 3 orang Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian.

Hasil penelitian dari pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok menghasilkan, pertama pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya mampu mandiri secara keuangan walaupun pendapatan asli daerah nya meningkat setiap tahunnya. Kedua, Proporsi alokasi anggaran pendapatan asli daerah untuk infrastruktur jalan setiap tahun nya mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi tahun 2016 sebesar 50,71%. Ketiga, Faktor penghambat dan pendukung dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan, faktor penghambatnya yaitu diantaranya belum optimalnya pemanfaatan asset-aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pad, kekurangan taatan warga dalam membayar pajak. selain itu juga keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa. Sementara itu faktor pendukungnya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Perbaikan terhadap manajemen pelayanan pendapatan daerah, melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, perbaikan sistem dan prosedur pelayanan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan, Infrastruktur Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan daerah hanya dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah pusat sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan antara pusat dan daerah. Sumber daya yang cukup potensial yang dimiliki daerah sebagian besar dikirim ke pusat, padahal semestinya sumber daya daerah yang besar dikelola secara mandiri oleh daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Pembangunan daerah yang terjadi selama orde baru dirasa tidak menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dan daerah. Salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur pemerintahan terpusat. Pada sistem pemerintahan terpusat ini pemerintah pusat berperan sebagai pengambil keputusan dan pembuat keputusan pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Sistem tersebut dianggap tidak efektif dan efisien bagi pembangunan di daerah, sehingga sistem ini dirasa tidak memuaskan

masyarakat yang menghendaki pembangunan yang menyeluruh dan merata di segala aspek kehidupan masyarakat daerah.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir (6) dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi

daerah secara berdaya dan berhasil untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Nurcholis Hanif, 2007:145)

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor yang dominan turut menentukan adalah segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas serta urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula. Semakin besar keuangan daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan tersebut tergantung didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah tersebut menentukan corak-corak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah

yang memang telah lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. (Nurcholis Hanif, 2007:176).

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan disemua sektor. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut, masalah utama yang dihadapi adalah masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana yang ada di daerah, yang harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah upaya pembinaan rumah tangga daerah. (Arnita, Kusnadi, 2004:84)

Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Empat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya otonomi daerah adalah : (Josef Riwu Kaho, 2007:66)

- 1) Faktor Manusia Pelaksana
- 2) Faktor Keuangan Daerah
- 3) Faktor Peralatan
- 4) Faktor Organisasi dan Manajemen

Faktor yang pertama adalah manusia, manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia sebagai pelaksana semua kegiatan pemerintahan. Faktor yang kedua adalah faktor keuangan, semua kegiatan pemerintahan memerlukan biaya. Faktor ketiga adalah faktor kegiatan, setiap benda atau alat yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintahan daerah antara lain komputer, alat-alat kantor, dan alat-alat

komunikasi. Faktor yang keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Jika suatu organisasi diatur dengan baik maka semua kegiatan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, faktor keuangan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator yang penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana. (Josef Riwu Kaho, 2007:283)

Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah;
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan\
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu elemen penting pembentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan daerah bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. (Mardiasmo, 2002 : 146)

Akan tetapi, bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari setiap Pendapatan Asli Daerah. Sebab pendapatan asli daerah hanya salah satu sumber utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lainnya berupa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan sebagainya. (Suriyansah Muharni, 2008 : 52)

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, Kota Depok yang sebelum dimekarkan merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, ikut serta mengaplikasikan kebijakan otonomi daerah, sehingga Kota Depok memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan didaerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting penunjang pembangunan daerah. Dibawah ini adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012-2016.

Tabel I. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok

Tahun 2012– 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2012	387.942.005.405.00	474.705.361.540.18
2	2013	513.087.581.193.55	581.437.750.560.26
3	2014	638.584.271.255.45	660.404.107.745.23
4	2015	697.154.396.353.00	818.350.028.264.96
5	2016	847.022.899.152.01	921.902.558.377.15

Sumber : Bappeda Kota Depok

Jika dilihat dari tabel diatas, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Depok relatif mengarah pada kemandirian daerah.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau

keampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Otonomi daerah di Indonesia tidak terpisahkan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan hal penting dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses Distribusi anggaran dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memang berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatan daerah. Kewenangan yang dimiliki bertujuan agar daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kewenangan ini daerah memang diharapkan secara bertahap memiliki kemandirian pendapatan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Adanya kebijakan tentang desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah salah satunya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. (UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kota Depok diidentifikasi

berdasarkan dinamika yang terjadi. Kota Depok diusiaanya yang menginjak 18 Tahun masih harus berbenah, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan pembangunan Kota Depok yang selama ini masih belum maksimal.

Persoalan yang dihadapi Depok sama seperti kota lain, yaitu kemacetan. Dengan penambahan penduduk yang kian pesat, pertumbuhan pun tidak terkendali. Permasalahan pembangunan infrastruktur mendasar seperti jalan, terus menghadapi kendala. Laju pembangunan infrastruktur belum sebanding dengan laju pertumbuhan Kota Depok yang kian pesat.

Kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di Kota Depok yang hampir setiap hari terjadi membutuhkan pelebaran jalan maupun kelanjutan pembagunan jalan tol yang sampai saat ini terhenti. Kondisi Kota Depok sekarang sudah sangat parah sehingga perlu terobosan pembangunan infrastruktur jalan, baik pembangunan jalan baru maupun pelebaran sangat dibutuhkan bagi Kota Depok yang terus berkembang sebagai salah satu mengurai kemacetan serta kemerawutan lalu lintas yang terjadi setiap hari.

Depok berpotensi besar mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan pusat perekonomian nasional sekaligus Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang strategis tersebut menempatkan Depok sebagai pintu gerbang (pintu gerbang antara DKI Jakarta dan Jawa Barat) bagi warga Jakarta yang ingin ke wilayah Jawa Barat ataupun sebaliknya. Kota Depok sebagai daerah otonom seharusnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena dilihat dari potensi daerah yang potensial. Kota Depok memiliki keunggulan ekonomi terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan industri.

Hal yang diusahakan oleh Pemerintah Kota Depok adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kreativitas dan inisiatif daerah untuk menggali sumber keuangan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah di Kota Depok”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun, merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Depok?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pembagunan infrastruktur jalan di Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat menambah

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiyono, Amirullah, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2 (Rangkuman 7UU, 30PP dan 30 Kemendagri)*, Jakarta: Indeks.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Handoko, T, Hani. 1997. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T, Hani. 2012. *Manajemen Edisi ke 2 (Cetakan ke 26)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Koho, Josef, Riwu. 2007. *Propek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kusnadi, Arnita. 2004. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- M Hanafi, Mamduh dan Halim, Abdul. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Meolong, J, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muharni, Suriyansah. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Septi Winarsih, Atik dan Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi pada DaerahTingkat II*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Dokumen :

Anggaran Perencanaan Belanja Daerah

Profil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Depok (DPPKA)

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Skripsi :

Juwanto. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pembangunan di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atika. 2013. *Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fasmawi Saban. 2015. *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2015*.

Internet :

(<http://taoefiq-oke.blogspot.co.id/2009/12/teori-pembangunan-daerah.html>).

www.depok.go.id)

(<http://celotehlestarius.blogspot.com>)